

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinova, Danu Eko. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktis*. Yogyakarta : Calpulis.
- Arikunto. (2002). *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistika. (2019). *Kota Semarang Dalam Angka 2019*. Semarang: CV Citra Yunda
- Creswell, John W. (2009). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djaenuri, Aries. (2015). *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indoneisa
- Djohan, Djohermansyah. (2007). *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka
- Dwiyanto, Agus. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyatuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Hamdi, Muchlis. (2015). *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Haris, Syamsuddin. (2007). *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: Lipi Press.
- Hayat. (2007). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rosyada, Dede Dkk. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Rohman, Ahmad Ainur dkk. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Program Sekolah Demokrasi
- Sae, Niki. (2019). *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: CV Eko Jaya
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance & Good Corporate Governance :Kepemerintahan Yang Baik & Good Governance Corporate Governance”*. Bandung: CV Mandar Maju
- Setiyono, Budi. (2016). *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung: Penerbit Nuansa
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sumarto, Hetifah Sj. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sumaryadi, I Nyoman. (2016). *Reformasi Birokrasi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Susanto. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: UNS Pres

Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press

Widjaja, HW. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indoneisa*. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.

Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media
Presindo.

Jurnal

Among, Rahmawati Leni Sri. (2017). Analisis Pemerintahan Dalam Program
Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Studi Kasus di
Kecamatn Semarang Barat Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Aufarul, Marom. (2015). Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Kudus. *Jurnal Manajemen dan
Kebijakan Publik*. 1:45

Firlena, Dila. (2016). Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Journal of Public and
Management Review*. 5:2

Rahadian, Achmad Hidayat. (2009). Mewujudkan Good Governance melalui
Pelayaan Publik. *Jurnal Ilmiah Stiami*. 58-59

Saleh, Hasrat Arief. (2011). Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan
Walikota Kepada Camat di Kota Makasar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4:1

Sianipar, David Ricardo. (2018). Kualitas Pelayanan Dalam Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) Kecamatan Cobleng Kota Bandung.

Sukarti, Ahmad. (2012). Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah. *Jurnal Mimbar* Vol XXVIII, 1, 41. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/7431-ID-otonomi-daerah-sebagai-instrumen-pertumbuhan-kesejahteraan-dan-peningkatan-kerja.pdf>

Internet

<https://semarangkota.bps.go.id/> di akses pada 5 Januari 2019 pukul 14.50 WIB

Undang-undang

Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Lembaran RI Tahun 2012 No. 43. Semarang: Walikota

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran RI Tahun 2009 No. 25. Jakarta: Sekretariat Negara

Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Lembaran RI Tahun 2010 No. 4. Jakarta: Sekretariat Negara

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran RI Tahun 2014 No. 23. Jakarta: Sekretariat Negara

Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran RI Tahun 2007 No. 25. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Semarang. Lembaran RI Tahun 2008 No. 55. Semarang: Walikota